

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Peran**

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi ( 1982 ) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto ( 2002:243 ), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan ( status ), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

#### **2.2. Pengertian Eksistensi**

Organisasi yang berhasil efektif merupakan organisasi dengan

individu yang memiliki kapasitas pribadi yang baik, cerdas dan berkualitas. Dengan perkataan lain bahwa organisasi yang efektif harus di topang oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai, sehingga dalam melaksanakan program kegiatan menjadi lebih mudah, efisien dan manfaat.

Makna eksistensi pada dasarnya adalah keberadaan akan sesuatu sehingga timbul kesan dan gambaran terhadap sesuatu. Hal yang perlu dicermati tidak hanya dimensi fisik, tetapi juga dimensi non fisik. Hal ini dapat di lihat dari 3 kriteria di bawah ini :

1. Eksistensi organisasi dapat di lihat dari hasil kerja yang merupakan pencapaian hasil ( outcome ) pada level atau unit analisis organisasi. Dalam hal ini dapat di lihat sejauh mana tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi dapat dicapai .
2. Bentuk lain dari eksistensi merupakan suatu gerak berupa proses tahapan dalam menghasilkan produk atau layanan yang terdiri dari tujuan, proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Dalam hal individu maka eksistensi merupakan pencapaian atau efektifitas yang di lakukan pegawai atau suatu pekerjaan, dimana pekerjaan tersebut menghasilkan gambaran positif terhadap organisasi. Dalam konteks ini yang menjadi inti pokok pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

G. Setya Nugraha dan R. Maulana ( 2010:177 ) eksistensi berarti tentang berada atau keberadaan, sedangkan wujudnya yakni sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan.

Dalam menjalani era broadband ekonomi Indoensia Tahun 2015 & era Indonesia digital Tahun 2018 menuju masyarakat yang sejahtera diperlukan suatu lembaga yang solid dan kreatif yang berwawasan pada teknologi informasi.

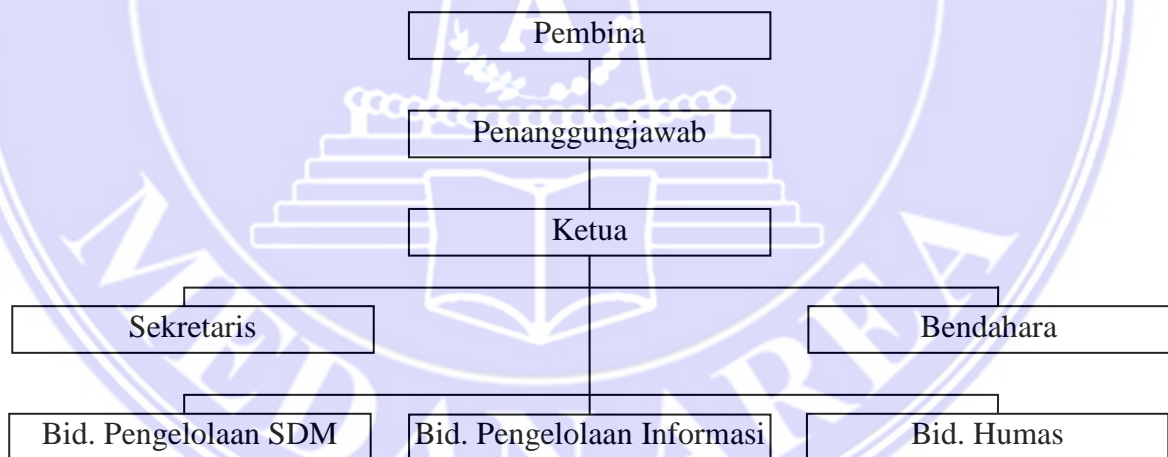
Lembaga atau kelompok tersebut merupakan sekumpulan orang - orang yang peduli pada suatu hal baru dan informatif, mau mengelola dan berbagi kepada masyarakat atas informasi yang diperoleh tersebut.

Berdasarkan pada Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh pemerintah dan pemerintah Kab / Kota yang merupakan implementasi dari PP No.38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab / Kota. Permen Kominfo tahun 2010 tentang pengembangan kemitraan media yang kemudian dipertegas dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial dengan ini disampaikan bahwa dalam pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) ketentuannya sebagai berikut:

1. Kelompok Informasi Masyarakat atau sejenisnya yang selanjutnya disingkat dengan KIM adalah lembaga yang muncul di tengah masyarakat dari dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Beraktifitas menegelola informasi, menyebarkannya sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat dan memberi nilai tambah ( Value Added ).
2. Umumnya di daerah terdapat beraneka ragam komunitas / kelompok

informasi masyarakat yang mau mengikuti perkembangan teknologi, yang memiliki kesadaran pentingnya pengetahuan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi, dan pemerintah berkewajiban mengembangkan dan memberdayakannya.

3. Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan berpegang pada prinsip sinergitas, terstruktur, terukur, terintegrasi, partisipatif, berkelanjutan dan kemitraan.
4. Pedoman dan pengembangan kelompok informasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan peran dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing - masing.
5. Kelompok informasi masyarakat berkedudukan di Kecamatan.
6. Struktur organisasi Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )



Syarat umum keanggotaan adalah orang – orang yang berkemauan dan berkemampuan dalam menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi yang berorientasi pada masyarakat.

7. Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, fasilitasi pengembangan model, kemitraan. Dalam diseminasi informasi, fasilitasi jaringan pengembangan usaha, kompetisi dan pemberian



penghargaan, penyediaan bahan informasi, dan fasilitasi studi banding.

8. Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemodelan, bimbingan teknis, workshop, simulasi, dan penyediaan bahan - bahan informasi.
9. Materi meliputi management, sumber daya manusia, dan kelembagaan.
10. Sarana yang dipakai adalah berbagai media komunikasi.
11. Bentuk pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah adalah koordinasi dan fasilitasi
12. Pengembangan kelompok informasi masyarakat dilakukan berjenjang antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dengan melibatkan semua pihak.

Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) di Kab. Deli Serdang merupakan hal yang sangat strategis dalam upaya pelancaran arus informasi di daerah pedesaan serta menyongsong peradaban masa depan, yakni peradaban masyarakat informasi.

Potensi kelompok komunikasi masyarakat di daerah pedesaan perlu dikembangkan dan eksistensi KIM yang telah terbentuk perlu diberdayakan dalam rangka mengembangkan dan memperluas jalur informasi yang efektif di daerah pedesaan.

Pengembangan dan pemberdayaan KIM merupakan alternatif dalam rangka mengatasi hambatan informasi kepada masyarakat, sebagai sebuah strategi, terbentuknya KIM yang tumbuh dari bawah perlu didorong, namun harus diikuti dengan berbagai aktivitas yang

melibatkan pihak terkait, agar KIM bermanfaat bagi anggotanya dan untuk masyarakat sekitarnya.

KIM sebagai komunitas informasi memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pelancaran arus informasi terutama di pedesaan. Karena itu, KIM perlu dikembangkan dan diberdayakan agar dapat berfungsi sebagai saluran komunikasi dan diseminasi yang efektif bagi masyarakat.

### **Akses Informasi**

Pengurus dan anggota KIM perlu ditingkatkan kemampuannya dalam mengakses informasi, baik dari media massa maupun dari media berbasis teknologi informasi.

Jadi, secara spesifik, peran KIM dapat diimplementasikan dalam bentuk melaksanakan sosialisasi, membangun komunikasi dialogis, dan melakukan diseminasi kesegenap lapisan masyarakat," katanya. Peran ideal dan strategis KIM diharapkan dapat menjadi wahana dan kanalisasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya.

Disamping itu juga sebagai contoh perlawanan pada dampak negatif informasi yang diusung melalui media elektronik. KIM perlu diberdayakan dengan harapan nanti dapat menjadi embrio terbentuknya masyarakat informasi.

Di Kabupaten Deli Serdang, KIM dibentuk sejak tahun 2011 lalu, oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli Serdang.

Tercatat KIM yang ada di Kabupaten Deli Serdang berjumlah 40 kelompok tersebar diseluruh kecamatan, dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli

Serdang Nomor: 108 Tahun 2011, tanggal 9 Maret 2011, tentang: Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa / Kelurahan di Kabupaten Deli Serdang.

Keberadaan organisasi KIM di Kabupaten Deli Serdang masih perlu ditingkatkan lagi peranannya seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi.

Untuk meningkatkan peran KIM di Kabupaten Deli Serdang, Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Deli Serdang telah menyelenggarakan beberapa kali pembinaan / pemberdayaan kepada seluruh KIM yang ada di Deli Serdang.

Pembinaan KIM di Deli Serdang dilakukan oleh tim pembina dari Dinas Informasi dan Komunikasi bersama instansi terkait melaksanakan pembinaan / pemberdayaan kepada anggota KIM di Kabupaten Deli Serdang.

Guna lebih meningkatkan kualitas KIM di Deli Serdang, Infokom Kabupaten Deli Serdang memfasilitasi pembentukan KIM yang dipelopori oleh 6 KIM yang ada di 5 kecamatan untuk dijadikan percontohan pembinaan KIM yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Enam KIM tersebut adalah: Sri Mersing ( Desa Paluh Sibaji, Kec. Pantailabu ), Lembayung ( Desa Pantailabu Pekan, Kec. Pantailabu ), Bersinar ( Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam ), Melati ( Desa Tumpatan, Kec. Beringin ), Guna Bangsa ( Kel. Galang Kota, Kec. Galang ) dan Mandala ( Desa Purwodadi, Kec. Sunggal ).Eksistensi KIM Deli Serdang mendapat respon dari masyarakat maupun dari beberapa daerah dan baru - baru ini menjadi

juara pertama dalam lomba obrolan KIM yang diselenggarakan Diskominfo Prop. Sumatera Utara di Taman Budaya Medan.

Karena kiprah KIM Deli Serdang dianggap aktif, direncanakan sebagai wakil Sumatera Utara untuk bertanding di Bali dalam lomba KIM se Indonesia yang diprakarsai oleh Kemenkominfo RI.

#### DATA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

##### KABUPATEN DELI SERDANG

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA KIM	TAHUN TERBENTUK
1	2	3	4	5
1	Pantailabu	Desa Paluh Sibaji	Sri Mersing	2011
2	Pantailabu	Desa Pantailabu Pekan	Lembayung	2011
3	Lubuk Pakam	Kel. Lubuk Pakam Pekan	Bersinar	2011
4	Lubuk Pakam	Kel. Cemara	Binakasi	2011
5	Beringin	Desa Tumpatan	Melati	2011
6	Sunggal	Desa Purwodadi	Mandala	2011
7	Sunggal	Desa Sei Semayang	Kramatjati	2012
8	Galang	Kel.Galang Kota	Guna Bangsa	2012
9	Galang	Desa Paku	Karya Indah	2012
10	Namorambe	Desa Kuta Tengah	Karya Utama	2012
11	Namorambe	Desa Sudirejo	Karya Kasi	2012
12	Bangun Purba	Desa Sibaganding	Seraya Makmur	2013
13	Bangun Purba	Desa Bagerpang	Gatrapatra	2013
14	STM Hilir	Desa Kutajurung	Kila	2013
15	STM Hulu	Desa Durin Tinggung	Winangun	2013
16	STM Hulu	Desa Durian Empat	Sukasi	2013
17	Percut Sei Tuan	Desa Cinta Damai	Kerta Raharja	2013
18	Percut Sei Tuan	Desa Cinta Rakyat	Suka Maju	2013
19	Percut Sei Tuan	Desa Pematang Lalang	Mitra Sejati	2013
20	Pancurbatu	Desa Bintang Meriah	Luhur Indah	2013
21	Pancurbatu	Desa Durin Tunggal	Sri Lumbang	2013



22	Tanjung Morawa	Desa Bangun Sari	Mertasari	2013
23	Tanjung Morawa	Desa Bangun Rejo	Eka Maju	2013
24	Labuhan Deli	Desa Karang Gading	Tunjung Biru	2013
25	Labuhan Deli	Desa Manunggal	Jihandak	2013
26	H.Perak	Desa Bulucina	Asri	2013
27	H.Perak	Desa Klambir lima	Jagadhita	2013
28	Biru-Biru	Desa Biru-Biru	Kuncara Giri	2013
29	Biru-Biru	Desa Candi Rejo	Tunas Mekar	2013
30	Delitua	Desa Mekar Sari	Puspitalara	2013
31	Delitua	Desa Suka Makmur	Buanacakra	2013
32	Pagarmerbau	Desa Jati Rejo	Surya	2013
33	Batangkuis	Desa Payagambar	Warta	2013
34	Gunung Meriah	Desa Bintang Meriah	Bintang Meriah	2013
35	Patumbak	Desa Lantasan Lama	Piring Sari	2013
36	Patumbak	Desa Lantasan Baru	Widya Praja	2013
37	Kutalimbaru	Desa Kuala Lau Bicik	Lau Bicik	2013
38	Sibolangit	Desa Ketangkuhen	Buana	2013
39	Sibolangit	Desa Buah Nabar	Dutanabar	2013
40	Beringin	Desa Pasar V	Rahayu	2013

### 2.3. Kelompok Informasi Masyarakat di era Informasi

Sistem informasi dan komunikasi dalam otonomi daerah mengalami perubahan. Jika dulu masyarakat banyak terbentur dalam system birokrasi yang sangat panjang. Pada era Otonomi ini sangatlah jauh berbeda. Dalam upaya mencapai Visi dan Misi yang jelas pada era Reformasi seperti sekarang ini, ditambah dengan teknologi digital system serta terbukanya kebebasan berpendapat dan menulis, banyak memberikan inspirasi bagi masyarakat. Sehingga komunikasi dan informasi dapat bebas tapi bertanggung jawab, sesuai dengan kaidah - kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Baik itu

berupa peraturan, perundang - undangan, dan lain sebagainya. Semua ini bertujuan agar pada masa yang akan datang dapat ditemukan suatu cara yang dapat memecahkan suatu persoalan secara cepat dan bertanggungjawab.

Pada teori kewenangan komunikasi, Barnard menganggap bahwa antara kewenangan dan komunikasi dapat dipadukan melalui teknik - teknik komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini penting untuk mencapai tujuan organisasi, dilain pihak, teknik - teknik komunikasi tersebut dapat dianggap sebagai sumber masalah organisasi. Permasalahan yang terjadi era informasi baru dirasakan pada masyarakat di tengah perkotaan, ataupun ditengah - tengah kabupaten. Sementara yang dipinggiran kota tidak dapat merasakan, apalagi yang jauh diperdesaan. Karena era informasi memerlukan infrastruktur, pendapatan, dan tingkat pendidikan yang saling mendukung.

Sehingga komunikasi dan informasi bermedia belum merata hingga keperdesaan. Padahal masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di sana.

Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat ) yang terdiri dari berbagai komunitas yang bergerak di bidang pemanfaatan, pengolahan, dan penerapan informasi melalui media massa cetak dan elektronik, serta media lainnya. Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) adalah Lembaga Layanan Publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan UU Nomor. 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor. 08 / Per / M.KOMINFO / 06 / 2010 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

### **2.3.1. Teori Difusi Inovasi**

Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan . Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan ( dikomunikasikan ) melalui saluran - saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers ( 1961 ), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan - pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers ( 1961 ) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.”

### **2.3.2. Kelompok**

Menurut Bonner (1959) dan Stogdill (1959), mereka berpendapat

bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi. Hal senada juga dikemukakan oleh Deutsch (1959) dan Mills (1967), bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang bersama - sama bergabung untuk mencapai satu tujuan. Begitu juga pengertian dari Kelompok menurut Cartwright & Zander, (1971: 20) kelompok adalah suatu kolektif yang terdiri atas berbagai organisasi dimana eksistensi semua anggota sangat penting untuk memuaskan berbagai kebutuhan individu. Artinya, kelompok merupakan suatu alat untuk mendapatkan berbagai kebutuhan individu.

Individu menjadi milik kelompok karena mereka mendapatkan berbagai kepuasan sebaik mungkin melalui organisasi yang tidak dengan mudah mereka dapatkan melalui cara lainnya.

### **2.3.3. Komunikasi Kelompok**

Suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terkait satu sama lain dan berkomunikasi tatap muka (Muhammad 2005). Komunikasi dalam kelompok yakni kegiatan komunikasi yang berlangsung diantara suatu kelompok. Pada tingkatan ini, setiap individu yang terlibat masing - masing berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam kelompok. Pesan atau informasi yang disampaikan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan bersifat pribadi.

### **2.3.4. Informasi**

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari ordersekuens dari simbol, atau makna yang



dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda - tanda, atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda.

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun demikian, istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya, dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropy, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi dan rangsangan mental.

#### **2.4. Pelayanan Publik**

Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik – baiknya menuju good governance. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.

Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sampingan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di negara berkembang pada masa lalu.

Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti :

- a. Tata cara pelayanan
- b. Rendahnya pendidikan aparat

c. Disiplin kerja.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah khususnya di kecamatan dan kelurahan / desa.

Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan.

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

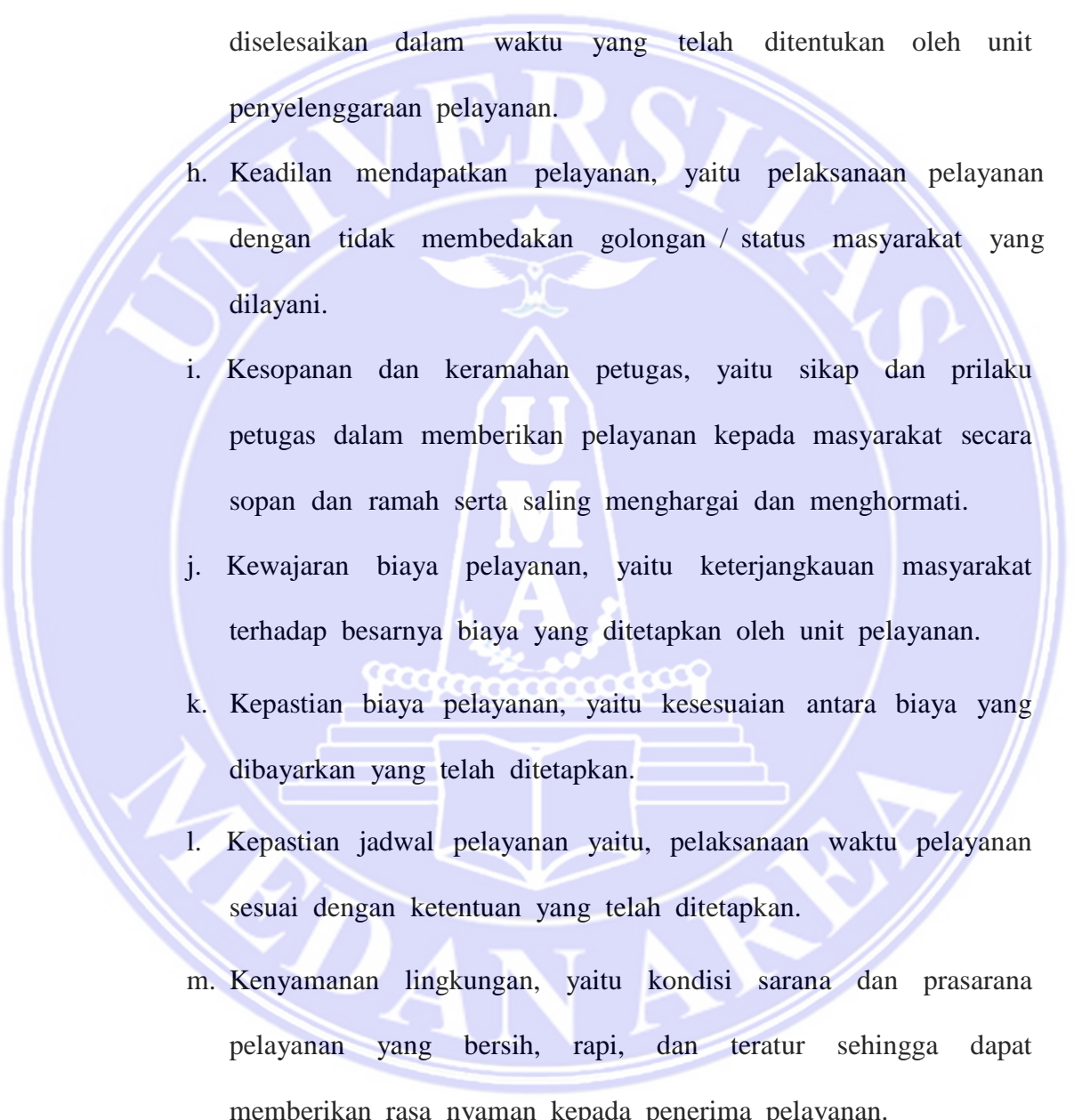
Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang mencerminkan lewat kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah desa atau kecamatan, dimana pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan publik sangat penting untuk diperhatikan demi suksesnya pembangunan di daerah

Adapun pelayanan publik menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan MenPAN Nomor : 25 tahun 2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid, dan reliable, yakni :

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan.
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan ( nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya ).
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Tanggungjawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.



- 
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan.
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan yang telah ditetapkan.
- l. Kepastian jadwal pelayanan yaitu, pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana dan prasarana yang digunakan.

Misi utama pelayanan dari birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat

melalui indikator produktivitas pemerintah daerah, yakni pelayanan publik yang berkualitas.

## **2.5. Pengertian dan Ciri – Ciri Desa Mandiri**

Sebelum kita membahas pengertian dan ciri – ciri desa mandiri, terlebih dahulu penulis sedikit mendefinisikan desa menurut undang – undang. Definisi desa adalah menurut : UU No. 6 / 2014 : Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sementara Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom dalam pengelolaan pembangunan desa.

Agar dapat diwujudkan hak otonom tersebut, maka desa perlu diperkuat sehingga mampu menjadi desa mandiri.

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata bergantung dengan bantuan dari pemerintah, meski ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang, dan mampu untuk mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pihak luar.

Desa mandiri dilihat dari beberapa wujud kemandirian yang dimiliki desa, dapat dibedakan dalam beberapa aspek antara lain :

- a. Aspek kemandirian Dalam Pengelolaan Pembangunan
- b. Aspek kemandirian dalam Pelayanan Dasar ( Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat )
- c. Aspek kemandirian dalam Pemerintahan Desa
- d. Aspek kemandirian Dalam Lembaga Kemasyarakatan
- e. Aspek kemandirian Dalam Pemberdayaan Warga

Adapun Ciri - Ciri dari Desa Mandiri adalah :

1. Desa mampu memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan adat istiadat, lokasi, wilayah dan budaya namun tetap dalam koridor aturan NKRI.
2. Desa mampu menyediakan energi alternatif sebagai penunjang kesejahteraan.
3. Desa mampu mengendalikan sampah dengan baik
4. Memiliki saluran drainase, MCK yang baik dan sesuai standard kesehatan.
5. Setiap warga menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan yang hijau dan bersih.

6. Desa mendukung pendidikan yang baik bagi generasi muda
7. Desa memberi kemudahan sarana dan sistem yang mudah bagi warganya yang ingin berinovasi.
8. Desa mandiri juga mampu mengolah sampah menjadi pupuk organik atau komposit.
9. Desa membantu pendistribusian hasil bumi dan peternakan dengan baik sehingga harga akan terkontrol dengan baik dan sigap akan adanya perubahan musim.
10. Terdapat sarana umum yang memadai dan dijaga bersama - sama
11. Setiap warga menyadari pentingnya menjaga ketentraman dan keamanan bersama.

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

1. Potensi Sumber Daya Manusia :
  - a. Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
  - b. Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
  - c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam
  - a. Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
  - b. Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat
  - c. Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.



3. Pasar
  - a. Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
  - b. Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

#### **2.6. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan desa mandiri.**

Aktor pembangunan di desa sangat menentukan upaya dan keberhasilan dalam mewujudkan desa mandiri dari berbagai aspek. Aktor di tingkat desa yang seharusnya mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan desa mandiri antara lain :

- a. Warga desa peran utamanya adalah sebagai pelaku utama dalam setiap tahapan proses mewujudkan desa mandiri
- b. Pemerintah desa, sebagai sumber informasi dan mendorong partisipasi warga,
- c. LPM dan KPM. Peran utamanya sebagai fasilitator dalam setiap tahapan proses mewujudkan desa mandiri
- d. BPD. Perannya mengembangkan regulasi desa ( peraturan desa ) serta melakukan pemantauan pelaksanaan program / kegiatan serta anggaran dalam kerangka mewujudkan desa mandiri
- e. Organisasi kemasyarakatan lainnya. Perannya sebagai sumber informasi dan pendukung dalam pelaksanaan upaya mewujudkan desa mandiri

Dalam upaya percepatan mewujudkan desa mandiri maka semua aktor harus memiliki kapasitas yang memadai sehingga dapat menjalankan perannya masing - masing dengan baik.

Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri antara lain adalah :

1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
2. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.
3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
4. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa / kota.

### **2.7. Pengertian Kelompok Informasi Masyarakat**

Menurut Direktorat Kelembagaan Komunikasi Sosial (2008:1) definisi Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Lokasi KIM terdapat di perkotaan atau di pedesaan. Anggota KIM dapat berjumlah 3 ( tiga ) orang sampai 30 ( tiga puluh ) orang, yang dapat terdiri dari remaja, orang dewasa / tua, laki - laki / perempuan, pelajar / mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan.

### **2.8. Tujuan Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat**

1. Menemukan masalah bersama melalui diskusi dengan anggota kelompok.
2. Mengenal cara pemecahan masalah
3. Membuat keputusan bersama
4. Melaksanakan keputusan dengan kerjasama.

5. Mengembangkan jaringan informasi untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.

## **2.9. Visi Kelompok Informasi Masyarakat**

Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) mempunyai visi yakni terwujudnya KIM yang inovatif dalam meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera.

## **2.10. Misi Kelompok Informasi Masyarakat**

Sedangkan misi dari kelompok informasi masyarakat adalah :

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KIM secara mandiri sebagai wahana informasi dalam masyarakat.
2. Meningkatkan peranan KIM dalam memperlancar arus informasi antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan anggota KIM dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi.

## **2.11. Fungsi, Tugas dan Peran Kelompok Informasi Masyarakat**

1. Sebagai wahana informasi.
2. Antar anggota KIM secara horisontal.
3. Dari KIM ke pemerintah secara bottom up.
4. Dari pemerintah kepada masyarakat secara top down.
5. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten / Kota dalam merumuskan kebijakan publik.
6. Sarana peningkatan literisasi masyarakat di bidang informasi dan

media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.

7. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu peran dari kelompok informasi masyarakat adalah KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok informasi masyarakat yang memiliki aktivitas mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut. meliputi sebagai berikut :

- a. Fasilitator informasi bagi masyarakat
- b. Mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi
- c. Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pelancaran arus informasi
- e. Terminal informasi

Tugas Kelompok Informasi Masyarakat

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat.
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya.



4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

## **2.12. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan ulasan diatas, menunjukkan bahwa Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) sebagai perpanjangan tangan pemerintah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengolah informasi – informasi pembangunan untuk menambah wawasan masyarakat dan mampu menjadikan masyarakat yang sadar betapa pentingnya informasi baik itu melalui media cetak dan elektronik demi terwujudnya desa yang mandiri.